

***Hasil Diskusi SKPD  
Kabupaten Maluku Tengah:  
Tindak Lanjut dan Rencana Aksi  
PPA***

*Thomas Silaya, Marthina Tjoa, Nining Liswanti  
CoLUPSIA - 6 Mei 2013*



**Collaborative Land Use Planning and Sustainable  
Institutional Arrangements for Strengthening Land  
Tenure, Forest and Community Rights in Indonesia  
(CoLUPSIA)**



<b>Variabel Kunci: Peran serta masyarakat</b>				
<b>Program</b>	<b>Usulan Kegiatan</b>	<b>Leading Sektor</b>	<b>Indikator</b>	<b>Hasil Diskusi SKPD</b>
Partisipasi Masyarakat di berbagai Program Pembangunan	Identifikasi potensi kondisi spesifik lokal (CoLUPSIA) dan kesesuaian lahan	BAPPEDA, Dishutbun, Distan, Pem. Negeri	Tersedia data informasi dari masyarakat.	Belum dilakukan, bs dilakukan oleh CoLUPSIA untuk komoditi tertentu, UNPATTI sdh ada data kesesuaian lahan di malteng)
	Perencanaan dan pengelolaan program pertanian mandiri oleh masyarakat	BAPPEDA, Dishutbun, Distan, Pem. Negeri	Tersedianya dana Pemda dan program kerja masyarakat.	Menurut KAPET seram, sudah lebih banyak dilakukan oleh masyarakat
	Penghijauan Lingkungan di luar kawasan hutan	Dishutbun, KLH	Berkurangnya luas lahan kritis.	
	Pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan RPJMD	BAPPEDA, SKPD terkait	Keterlibatan masyarakat	Sudah jalan melalui rembung desa dan musrembang
	Padat Karya Pembangunan	BAPPEDA, SKPD terkait	Pembangunan di desa.	
	Pembuatan Peraturan Negeri	Bagian Hukum dan Pemerintahan	Dokumen Peraturan Negeri.	Peraturan mata rumah sudah dilaksanakan, untuk peraturan negeri masih tahap perencanaan
	Hutan Desa	Dinas Kehutanan, pemerintah negeri	Tersedianya lokasi Hutan Desa.	Pasti di follow-up tapi tidak sekarang. Yang sudah ada adalah hutan kemasyarakatan, sudah diusulkan 2013)
	Fasilitasi Penetapan Batas-batas Hak Ulayat	Intansi Kehutanan, Pemerintahan Negeri	Adanya batas-batas desa yang permanen	Sudah pernah dilakukan tapi tidak ada kesepakatan dari masyarakat

<b>Variabel Kunci: Peran serta masyarakat</b>				
<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Leading Sektor</b>	<b>Indikator</b>	<b>Hasil Diskusi SKPD</b>
Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintahan dan Tugas Perbantuan dari Pemda ke Pem. Negeri untuk mekanisme Pembangunan Negeri.	Penyerahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri	Bag. Hukum dan Pemerintahan, Pem. Negeri	SK Bupati tentang penyerahan Urusan pemerintahan.	Sudah dilakukan oleh Bagian Hukum
	Penyerahan Tugas Pembantuan	Bag. Hukum dan Pemerintahan, Pem. Negeri.	SK Bupati tentang tugas perbantuan	Sudah menjadi program bagian hukum, misal: Retribusi
Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan	Penguatan Fungsi Lembaga Adat (Kewang Darat)	SKPD terkait (Bag Pemerintahan, Dishutbun), kendala regulasi untuk pemanfaatan kayu di kwsan ht lindung. Perlu sosialisasi dr instansi terkait. Dorongan dari bag pemerintahan untuk kebutuhan ini, proaktif ke desa untuk mengusulkan kewang	Jumlah Kewang yang ditetapkan.  CoLUPSIA, Instansi terkait (Bag Pemerintahan/badan Pemberdayaan Masy dan Pem neg), Latupati	Kewang darat sudah ada di desa adat tapi belum berfungsi optimal, tapi sudah ada Pamswakarsa (program TN, untuk desa di kawasan penyangga)

<b>Variabel Kunci: Legalitas Lahan</b>				
<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Leading Sektor</b>	<b>Indikator</b>	<b>Hasil Diskusi SKPD</b>
Hak Ulayat dan Kearifan Lokal	Penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam penentuan rencana pemanfaatan lahan	BAPPEDA, Bag.Pem. Setda, Dishutbun, Pemilik Lahan	Adanya Kelembagaan Lokal yang kuat.	Sudah dilakukan Bappeda dalam Musrebang
	Pelibatan masyarakat pemilik lahan dalam rencana pemanfaatan lahan	BAPPEDA, BPN, Bag. Pem. Setda, Dishutbun, Pemilik Lahan	Adanya sistem pengelolaan lahan yang terintegrasi.	Pembebasan lahan selalu menjadi pertimbangan
	Kajian Hak Ulayat dan Kearifan Lokal dalam pengelolaan SDA melibatkan negeri dan lembaga adat.	Dishutbun, Pemerintah negeri, BAPPEDA	Laporan kajian akademis tentang Hak Ulayat dan kearifan lokal	Sudah dilakukan oleh Dishutbun & Unpatti
	Perda Hak Ulayat	BAPPEDA, Bag.Pem. Setda, Dishutbun, DPRD, BPN, Pemerintah Negeri	Dokumen sebagai input bagi Eksekutif dan Legislatif untuk pembuatan Perda.	Masih ada masalah internal di masyarakat terkait batas lahan adat
<b>Variabel Kunci : Kebijakan Kepala Daerah</b>				
<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Leading Sektor</b>	<b>Indikator</b>	<b>Hasil Diskusi SKPD</b>
Kebijakan Kepala Daerah yang berpihak pada masyarakat	Partisipasi Masyarakat dalam proses kebijakan penggunaan lahan dan investasi oleh pihak ke-3	BAPPEDA, Dishutbun, Distan, Pem. Negeri	Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penggunaan lahan.	Sudah dilaksanakan o/ Bupati melalui program TABAOS (informasi ke masyarakat)
	Perda pembagian hasil terkait investasi di wilayah hak ulayat.	BAPPEDA, Dishutbun, Distan, Pem. Negeri, DPRD	Perda pembagian hasil kepada masyarakat.	

<b>Variabel Kunci : Kebijakan Tata Ruang</b>				
<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Leading Sektor</b>	<b>Indikator</b>	<b>Hasil Diskusi SKPD</b>
	Kebijakan Kepala Daerah tentang Pemberantasan KKN terkait Ijin Usaha	Bagian Pem. dan Hukum Setda, DPRD, Pem. Negeri, DPRD, Pem. Negeri	Peraturan di tingkat daerah yang mengatur tentang Ijin Usaha yang bebas KKN	
	Kebijakan Kepala Daerah terkait Investasi Sumberdaya Alam.		Peraturan di tingkat daerah yang mengatur tentang Investasi SDA.	
Kebijakan Tata Ruang yang rasional dan realistis	Identifikasi dan Inventarisasi penggunaan lahan dalam rangka Revisi RTRW Kabupaten Malteng	BAPPEDA, Instansi terkait	Data dan informasi untuk revisi RTR	Sudah dilakukan oleh CoLUPSIA, pengembangan ke depan untuk revisi RTRW o/ Dishutbun dan TNM. Dinas pertambangan sudah mengidentifikasi potensi emas di 11 kecamatan (desa sampel yaitu Desa Kanuku, Desa Tamilouw)
	Revisi RTRW Kabupaten Malteng	BAPPEDA, Instansi terkait	Dokumen RTRW hasil Revisi	Sudah dilakukan Bappedda
	Sosialisasi RTRW Kabupaten Malteng	BAPPEDA, Dishutbun,	RTRW diketahui dan dipahami oleh berbagai pihak.	Sudah dilakukan Bappedda
		Bagian Hukum dan Hubmas Setda.		
Survey TGL untuk memperoleh data tentang kondisi penggunaan lahan terkini	BAPPEDA, Instansi terkait	Data dan Informasi tentang status dan kondisi lahan.	Sudah dilakukan CoLUPSIA. Dishutbun sudah melakukan survey penutupan lahan. Pertambangan melakukan survey galian C & logam mulia	

<b>Variabel Kunci : Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat</b>				
<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Leading Sektor</b>	<b>Indikator</b>	<b>Hasil Diskusi SKPD</b>
	Workshop penyamaan persepsi tentang hasil survey TGL	LSM dan semua pihak terkait	Dokumen kesepakatan hasil survey tata guna lahan	Dilakukan oleh CoLUPSIA
	Revisi Peta TGL	BAPPEDA, dan instansi terkait lainnya.	Peta TGL sesuai kondisi terkini.	Kesepakatan untuk revisi peta landuse & land allocation di Seram, Kab. Malteng sesuai kondisi terkini. (Workshop Colupsia di Masohi, 30 Agustus 12)
Pemberdayaan Masyarakat berbasis sumberdaya local	Melakukan pendataan/spesifikasi LSM Lokal dan internasional yang bekerja di Malteng	BAPPEDA dan instansi terkait.	Data tentang calon LSM pendamping.	CoLUPSIA, MMC, Toma, Kapet Seram
	Kemitraan dengan LSM pendamping program pemberdayaan.	Instansi terkait	MoU antara LSM dengan Instansi terkait.	
	Workshop program Pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.	LSM, masyarakat dan Instansi terkait.	Kesepahaman program pemberdayaan yang dilaksanakan	CoLUPSIA
	Implementasi program Pemberdayaan Masyarakat	LSM, masyarakat dan Instansi terkait.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat.	CoLUPSIA, Kapet Seram, TM, Dinas Pertanian, Dishutbun, Dinas Perikanan (untuk pengolahan hasil)

**Variabel Kunci : Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Leading Sektor</b>	<b>Indikator</b>	<b>Hasil Diskusi SKPD</b>
	Kewajiban Perusahaan terhadap Masyarakat sekitar melalui CSR (Coorporate Social Responsibility)	SKPD terkait.	Peraturan tentang kewajiban CSR.	Dilakukan oleh Dishutbun
	Pembentukan dan pembinaan industri kecil	SKPD terkait	Kelompok usaha industri kecil berbasis SDA Lokal	Dilakukan oleh TNM dan Dinperindag
	Pembentukan kelompok sadar wisata	Dinas Pariwisata	Kelompok Sadar Wisata.	Program tahunan Dinas Pariwisata, di Seram Utara Sawai/Saleman tahun 2013). Renja Dispariwisata 2012-2017. PMPM Pariwisata (kementrian pariwisata)
	Pemberian Bantuan Modal Usaha.	SKPD terkait	Adanya aktifitas Usaha masyarakat.	Sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi